

The Weaponisation of Everything

Arya Raditya Tjahjono dan Joseph Kristanto

Penulis : Mark Galeotti
Penerbit : Yale University Press
Tahun : 2022
Halaman : 236

Dunia sedang mengalami pergeseran dalam konteks metode peperangan. Dunia kini menghadapi peperangan tingkat rendah yang berkelanjutan. Perang sering muncul secara tidak disadari, tanpa deklarasi, tidak akan berakhir, serta membuka potensi bagi kawan atau sekutu untuk juga dapat menjadi lawan atau pesaing. Konfrontasi yang terjadi saat ini nyatanya tidak lagi dilakukan di medan perang, tetapi menggunakan aspek kehidupan yang “dipersenjatai” untuk mencapai kepentingan nasional. Beberapa contoh aspek tersebut adalah sanksi ekonomi, disinformasi antivaksinasi, hingga *hooliganisme* penggemar sepak bola, layaknya yang terjadi ketika konfrontasi antara penggemar sepak bola Rusia dengan Inggris dalam ajang turnamen sepak bola Eropa di Perancis pada tahun 2016 yang dikatakan sebagai sebuah kelanjutan dari ‘perang hibrida/*hybrid war*’ yang dilakukan oleh Vladimir Putin. Oleh karena itu, beberapa aspek yang berpotensi dipersenjatai akan dieksplorasi lebih jauh, termasuk bisnis, kejahatan, kehidupan secara umum, hukum, teknologi informasi, dan budaya.

Sebelum membahas setiap cara modern dan nonkonvensional yang digunakan dalam perang masa kini, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai titik balik bangkitnya ‘*weaponization*’, yaitu kecenderungan untuk mempersenjatai sektor-sektor nonmiliter sebagai alat diplomatik yang koersif. *Weaponization* pertama kali secara jelas ditemukan dalam konteks aneksasi

Krimea oleh Rusia. Pada saat itu, taktik Rusia adalah campuran antara tipuan, kriminalitas, propaganda, disinformasi, serangan siber, serta 'sedikit' peluru, Rusia hanya perlu menumbuhkan bibit-bibit kemarahan yang dirasakan masyarakat dan Krimea terhadap pemerintah pusat Ukraina yang terkesan mengabaikan wilayah tersebut. Kemudian, menaruh kelompok 'sipil' pro-Rusia dalam kursi pemerintahan lokal sebagai bentuk pemberontakan kepada Ukraina, hingga pada akhirnya mengisolasi wilayah Krimea melalui sabotase informasi dan pengerahan militer dalam rangka sepenuhnya mengambil-alih wilayah Krimea.

Melalui taktik tersebut, cara peperangan yang baru telah lahir dan belum ada istilah yang tepat untuk mendeskripsikannya. Beberapa istilah seperti Perang Asimetris (*Asymmetric War*), Perang Hibrida (*Hybrid War*), Peperangan Area Abu-Abu (*Grey Zone Warfare*), Perang Toleransi (*Tolerance War*), dan Perang Nonlinier (*Non-Linear War*) muncul sebagai nama perwakilan dari taktik tersebut. Seluruh istilah tersebut pada dasarnya mencerminkan sebuah taktik baru dalam peperangan yang mengaplikasikan metode campuran (*mixed methods*). Istilah taktik ini sudah bermunculan di beberapa negara; seperti *Unrestricted Warfare* di Tiongkok, *Gibridnaya Voyna* di Rusia, dan *Hybrid War* di Barat. Meskipun merupakan fenomena yang relatif baru, cara-cara tersebut sebenarnya sudah digunakan sejak abad pertengahan oleh aktor berdaulat di Eropa.

Pada hakikatnya, istilah *weaponization* dengan istilah-istilah perang yang menerapkan metode campuran tersebut bisa berbeda berdasarkan konteksnya. Bagi *unrestricted warfare*, skenario perang melawan negara berteknologi canggih atau militer yang kuat bisa dimenangkan oleh negara yang lebih lemah dengan menggeser perang atau konflik tersebut ke ranah lain (ekonomi dan terorisme); bagi *hybrid war*, negara dapat

mengombinasikan pertempuran di medan perang, subversi atau pemberontakan terselubung, disinformasi, serangan siber, dan lainnya. Sementara itu, dalam konteks *weaponization* tidak semua hal yang perlu dijadikan 'senjata' harus dikonotasikan kepada sebuah konflik, seperti gambar kucing lucu yang sering tersebar di sosial media dengan sedikit pesan-pesan negatif atau disinformasi bahkan dapat menjadi senjata ampuh dalam melemahkan atau melumpuhkan suatu pihak.

Selain munculnya cara berperang baru yang lebih efektif dalam konflik kontemporer, peperangan konvensional menjadi sangat mahal untuk dilakukan, baik dari sisi pembiayaan atau korban. Sejak Perang Dunia II (PD II), alokasi dana untuk perang berada di tingkat tertinggi dalam sejarah. Kondisi ini diperparah dengan harga senjata yang sangat mahal. Contohnya, sebuah pesawat perang model *Spitfire* saat PD II dibanderol dengan harga £12.500 atau hari ini setara £822.000, sedangkan pesawat model *F-35 Lightning II* milik Inggris kini seharga £92 juta. Realitas tersebut memaksa negara-negara untuk mempergunakan sarana alternatif yang lebih terjangkau.

Fungsi konvensional seorang prajurit juga telah bergeser menjadi sebuah alat multifungsi. Prajurit saat ini diibaratkan sebagai sebuah pisau *Swiss Army*, yakni satu alat dengan banyak kegunaan. Saat Pandemi Covid-19, contohnya, tentara Spanyol memberlakukan jam malam di Madrid; dokter militer Rusia ikut terjun ke kota-kota di Italia untuk membantu pemulihan (sebagai bentuk diplomasi viral Rusia); serta tentara Inggris ikut membagikan masker, alat pelindung diri, dan alat tes ke rumah sakit. Tentara dan prajurit saat ini sudah terintegrasi dengan seluruh aspek kebijakan negara sehingga batas antara keamanan dan sektor lainnya menjadi tidak jelas. Tentara saat ini juga bahkan dapat ditugaskan sebagai personel medis, spesialis bencana, hingga penjaga perdamaian (*peacekeeper*). Dalam kata lain, para tentara juga

dapat menjadi senjata *soft power* bagi negara. Kondisi tersebut dapat terjadi karena melalui *weaponization*, tidak hanya tentara saja yang dapat dikerahkan atas nama keamanan, tapi institusi dan individu lain juga dapat dikerahkan untuk “mengamankan”.

Sarana selanjutnya yang bisa menjadi “senjata” adalah bisnis, termasuk sistem keuangan. Sebagai contohnya, Palau, sebuah negara kecil di Laut Filipina, dipaksa oleh Tiongkok untuk mengakui klaim *One China* dan memutus semua hubungan diplomatik dengan Taiwan. Tiongkok menggunakan pengaruh bisnis pariwisatanya di Palau untuk “menghukum” Palau ketika tidak mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya Tiongkok. Kata “Palau” dihapuskan dari jaringan internet Tiongkok dan penyedia jasa wisata ke Palau di Tiongkok dipaksa untuk menghentikan jasanya. Langkah tersebut menghancurkan sektor terbesar Palau, yakni pariwisata. Taktik embargo sebenarnya sudah digunakan sejak abad ke-17 dan 18. Namun, sejak kebangkitan globalisasi yang menyebabkan terintegrasinya ekonomi dunia, taktik tersebut menjadi lebih mematikan. Mulai dari embargo impor tomat Rusia dari Turki tahun 2015 hingga embargo finansial Amerika Serikat terhadap Venezuela tahun 2019 menyebabkan negara yang terkena embargo atau sanksi berteriak sengsara. Contoh-contoh lainnya termasuk pemutusan jaringan The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) dari bank-bank Iran oleh Amerika Serikat pada tahun 2012 sebagai bentuk serangan terarah.

Melanjutkan dari taktik menjadikan bisnis sebagai “senjata”, terdapat cara untuk “membeli” dan mendapatkan pengaruh melalui monopoli aset strategis. Dalam sejarah, manuver semacam ini dapat dilihat saat Tiongkok mengontrol persediaan logam tanah jarang (neodimium dan disprosium) yang digunakan untuk laser dan magnet mutakhir, atau dalam kasus

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang berperilaku layaknya kartel dengan lebih dari setengah produksi minyak dunia pada tahun 1970. Posisi mereka menjadi strategis karena memiliki pengaruh dan daya tawar yang kuat terhadap pihak lain. Kasus yang lebih kontemporer dan unik adalah kasus Huawei, sebuah perusahaan telekomunikasi milik Tiongkok, yang hanya dianggap sebagai perpanjangan dari instrumen milik Partai Komunis Tiongkok untuk merealisasikan kepentingan nasionalnya. Posisi Huawei sebagai pemain unggul di sektor telekomunikasi membuatnya dapat menjanjikan nilai-nilai keuntungan yang sangat besar sehingga memiliki daya tawar yang kuat. Di Inggris, Huawei dekat dengan politisi dan pembuat kebijakan dari berbagai latar belakang politik, menggelontorkan donasi ke institusi pendidikan, dan bekerja sama dengan perusahaan hubungan masyarakat ternama untuk memperkuat kekuatan lobi. Contoh tersebut hanyalah beberapa dari banyak cara untuk “membeli” pengaruh dan teman.

Negara tidak jarang pula mempergunakan kriminalitas sebagai senjata untuk berperang dan sarana untuk meraih kepentingan nasionalnya. Meski taktik lama, penggunaannya lebih sering terjadi setelah Perang Dingin. Perekrutan kelompok kriminal serta manipulasi masuknya senjata, narkoba, dan imigran melalui aksi korupsi menjadi sangat lazim dalam konflik geopolitik modern. Secara khusus, terdapat tiga jenis kriminalitas yang bisa menjadi “senjata”. Pertama, kriminalitas tersembunyi atau bersifat rahasia, contohnya upaya Iran melalui Korps Garda Revolusi Iran dalam mencari jalan keluar dari sanksi yang membelitnya melalui penyelundupan heroin untuk menggalang dana. Kedua, kriminalitas siber yang mempergunakan komputer super canggih untuk melemahkan lawan, misalnya perampokan daring yang dilakukan oleh Reconnaissance General Bureau milik Korea Utara yang diperkirakan pada tahun 2019 sudah mencuri sebanyak 571 juta Dolar AS dalam jangka waktu 20 bulan. Terakhir, kriminalitas dalam bentuk

pembunuhan terorganisir, seperti pembunuhan Hevrin Khalaf (Sekretaris Jenderal partai Kurdish Future Syria) pada tahun 2019 oleh pembunuh tak dikenal yang memiliki hubungan dekat dengan Ankara. Pembunuhan itu dilakukan setelah Turki meluncurkan operasi ofensif di Suriah Utara dengan harapan mencegah prospek berdirinya negara Kurdi di Suriah.

Pemberian bantuan kemanusiaan dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, atau bahkan manusia itu sendiri, juga dapat dijadikan sebagai senjata bagi suatu negara untuk mencapai kepentingan politiknya masing-masing. Contoh dari politisasi pemberian bantuan kemanusiaan dapat dilihat dalam kasus Venezuela ketika bantuan diberikan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat untuk mendelegitimasi rezim Maduro dan menguatkan posisi kelompok oposisi yang dipimpin oleh Juan Guaidó. Selain pemberian bantuan kemanusiaan, kebutuhan hidup manusia pun kini telah dipersenjatai. Akses terhadap air, misalnya, telah kerap kali dijadikan sebagai suatu senjata geopolitik untuk mencapai kepentingan negara-negara tertentu seperti Ukraina yang memotong akses air dari Kanal Krimea Utara dan kemudian memaksa Rusia untuk mengeluarkan biaya besar guna mencegah terjadinya kekeringan di Semenanjung Krimea. Tak hanya pemberian bantuan dan kebutuhan hidup manusia saja, tetapi manusia itu sendiri telah kerap kali digunakan sebagai senjata politik oleh suatu negara. Contohnya dapat dilihat dari perilaku Turki terkait kritik Uni Eropa terhadap intervensi Turki di Suriah. Usai Uni Eropa mengkritik operasi ofensif Turki di Suriah yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil dan mengancam akan menjatuhkan sanksi, Presiden Erdoğan kemudian mengancam akan membuka perbatasan Turki dan membiarkan 3,6 juta pengungsi yang ditampung oleh Turki membanjiri Eropa jika Uni Eropa tak berhenti menganggap operasi ofensif Turki di Suriah sebagai suatu invasi.

Selanjutnya dalam realitas dunia modern, segala sesuatu dibentuk dan diatur oleh hukum yang melampaui batas-batas nasional dan politik. Perkembangan hukum internasional secara khusus sudah terbilang cukup komprehensif. Hukum internasional sebagai alat taktis juga dikenal di bidang keamanan ketika instrumen hukum sering digunakan untuk kepentingan internasional dan nasional. Dengan demikian, hukum internasional menjadi senjata politik, lalu pengadilan dan forum internasional sebagai medan pertempurannya. Dinamika di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, Rusia menggunakan hukum internasional sebagai instrumen untuk memperluas wilayahnya hingga kawasan Arktik yang terkenal dengan cadangan minyak dan gas bumi. Dasar klaim yang digunakan adalah kawasan Arktik merupakan perpanjangan dari landas kontinen Siberia sebagaimana diatur oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Instrumen hukum juga dapat digunakan untuk tujuan represif, seperti Presiden Erdogan yang menggunakan *red notice* Interpol untuk menangkap lawan-lawan politiknya di luar negeri. Sekalipun instrumen hukum cenderung digunakan untuk tujuan revisionis, hukum pada dasarnya dapat diperdebatkan dan semua negara akan menggunakannya untuk kepentingannya masing-masing. Intinya, hukum dapat digunakan untuk tujuan yang baik, tetapi sebaliknya, instrumen hukum juga dapat digunakan sebagai “senjata” untuk memfasilitasi kepentingan nasional masing-masing negara.

Pemanfaatan informasi pun bisa menjadi sarana untuk mencapai tujuan politik suatu negara. Kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan internet oleh manusia telah menciptakan suatu kerentanan baru. Setiap orang kini dapat mengisolasi dirinya sendiri dalam suatu gelembung berita (*news bubble*) berisi informasi, baik yang akurat maupun palsu, yang menguatkan asumsi dan opini yang dimiliki oleh masing-masing

individu. Negara maupun aktor tertentu menjadi lebih mudah untuk memalsukan informasi dan menggiring opini publik serta menimbulkan kebingungan dan kekisruhan dari adanya gelembung berita dan begitu banyaknya informasi yang membombardir keseharian setiap individu. Kerentanan ini kemudian digunakan oleh negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran yang merasa bahwa dirinya sedang terlibat dalam suatu perang naratif dengan Barat untuk mengamankan kepentingan politik masing-masing. Rusia berusaha menciptakan suatu “kabut kepalsuan” sehingga akan sulit bagi masyarakat dalam menentukan mana berita benar dan mana berita palsu, sedangkan Tiongkok memanfaatkan media yang dimilikinya guna menciptakan liputan positif yang dapat memperindah citranya di panggung internasional. Untuk mengatasi ancaman ini, negara-negara Barat hingga kini belum memiliki suatu respons yang kuat untuk mencegah penyebaran disinformasi dan misinformasi. Pemerintah dan elite-politik perlu menyadari bahwa kunci untuk menyelesaikan persoalan ini terletak di tingkat literasi digital dan media yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan suatu kampanye untuk mengedukasi masyarakat umum terkait peperangan informasi yang terjadi dan bagaimana cara-cara untuk memilah informasi yang beredar di internet.

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya mengakibatkan meledaknya jumlah kampanye disinformasi dan misinformasi saja, tetapi turut menyediakan suatu medium bagi masing-masing negara untuk menyebarkan pengaruh budayanya, baik untuk membentuk persepsi publik domestik maupun internasional. Tiongkok, misalnya, menggunakan media film sebagai suatu alat untuk mengumumkan kehadirannya sebagai suatu kekuatan besar dunia. Tiongkok juga menggunakan media budaya sebagai alat untuk menyensor perdebatan terkait dengan isu-isu yang dipandang problematik. Pembungkaman yang dilakukan National Basketball Association

(NBA) terhadap Daryl Morey dan juga semua pesan anti-Tiongkok yang mengangkat isu demokrasi di Hong Kong menjadi akibat dari tekanan Tiongkok yang mengancam akses NBA terhadap pasarnya. Tujuan dari kampanye Tiongkok ini untuk menjadikan kebijakan kontroversialnya sebagai topik yang dilarang untuk dibahas. Dengan menghilangkan perdebatan terkait apa yang salah dari perbuatan Tiongkok, langkah ini dapat melemahkan keinginan publik Amerika Serikat untuk terlibat dalam suatu konfrontasi dengan Tiongkok. Tiongkok bukan negara pertama yang mengandalkan kekuatan budaya sebagai sarana menyampaikan pesan dan menjaga kepentingan politiknya di panggung internasional. Semenjak era Perang Dingin, blok Barat maupun blok Timur kerap menggunakan medium budaya sebagai alat untuk mendelegitimasi dan melemahkan posisi lawan politiknya, sebagaimana ditunjukkan dalam upaya Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (Central Intelligence Agency, CIA) mengirimkan buku-buku anti-Stalin menyeberangi tirai besi yang ada di benua Eropa pada kala itu. Guna menghadapi penggunaan kultur dan produk-produk budaya sebagai “senjata”, negara-negara demokrasi liberal Barat harus bisa benar-benar menganut nilai-nilai yang diagung-agungkannya sendiri. Sebuah kontra terhadap aksi ofensif menggunakan budaya bisa dilakukan jika negara-negara Barat mampu memimpin dengan memberi contoh kepada negara-negara lain atas bagaimana seharusnya suatu negara berperilaku.

Menjadikan berbagai aspek kehidupan manusia, dan bahkan manusia sendiri, sebagai “senjata” telah menghadirkan suatu kekacauan dan instabilitas dalam sistem internasional. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh fakta bahwa dunia kini telah bebas dari struktur internasional yang sangat mengikat negara-negara, sebagaimana pada masa Perang Dingin, serta dunia kini telah bebas dari bahaya akan terjadinya peperangan terbuka antarnegara. Akan tetapi, tidak berarti bahwa dunia kini telah menjadi lebih aman karena

peperangan dan perebutan pengaruh serta kompetisi ekonomi antara negara-negara yang ada di dunia tetap saja terjadi. Hanya saja kini semua hal itu terjadi tanpa keberadaan struktur internasional era Perang Dingin yang mengikat negara dalam menentukan pilihan kebijakan yang akan ditempuhnya. Ketika negara-negara kini tidak lagi dapat berperang secara terbuka, instabilitas menyediakan suatu ruang bagi negara-negara yang berkompetisi untuk melanjutkan “peperangannya” secara abu-abu. Dengan demikian, aspek-aspek nonmiliter dan nonpolitik dari kehidupan manusia terseret ke dalam pusaran persaingan geopolitik. Namun, umat manusia bukan berarti harus/bisa melarikan diri dari instabilitas tersebut. Negara sepatutnya bisa memanfaatkan fleksibilitas dari instabilitas yang ada dan melihat bagaimana instabilitas tersebut menghadirkan ruang-ruang yang sebelumnya tertutup untuk kemudian dapat dieksploitasi oleh negara demi kepentingannya sendiri.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kini dunia bergerak mengakibatkan semua negara berada dalam suatu situasi “perang” dengan negara lain dalam tingkat yang berbeda-beda sehingga menjadikan dikotomi perang dan damai yang selama ini dianut menjadi ketinggalan zaman. Dalam dunia yang baru ini, konflik merupakan suatu hal yang permanen karena setiap negara terlibat dalam suatu pertarungan politik dengan negara-negara lainnya. Kondisi ini turut mengakibatkan semakin kaburnya garis batasan antara “sekutu” dengan “musuh”, sebagaimana ditunjukkan dalam interaksi negara-negara Barat dengan Rusia maupun dengan Turki. Dalam menghadapi dunia yang berubah, institusi-institusi internasional memainkan peran yang makin penting dalam menjamin stabilitas. Hanya saja, fokus institusi-institusi internasional kini harus dialihkan dari pencegahan perang antara kekuatan-kekuatan besar menjadi upaya untuk mengendalikan dan meregulasi perilaku negara dalam sektor-sektor baru yang telah berubah

menjadi medium konflik antarnegara. Pada saat yang bersamaan, negara dengan sektor swasta dan manusia sebagai individu harus bisa mengadaptasikan diri dengan situasi baru. Keterlibatan sektor swasta menjadi sangat penting mengingat keterlibatan mereka dalam konflik antarnegara yang tidak terlihat ini. Berbagai media sosial milik perusahaan swasta kini telah menjadi suatu medan pertempuran baru yang digunakan oleh negara untuk berperang. Oleh karenanya, pihak swasta harus bisa didorong untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar guna mengatur konten yang berada dalam platform-platform mereka untuk mencegah ruang daring menjadi semakin toksik dan manipulatif. Keterlibatan individu dapat dimulai dengan membangun kebiasaan sehari-hari untuk memeriksa ulang informasi yang mengalir masuk ke dalam berbagai media agar mengurangi kerentanan masyarakat terhadap persebaran berita palsu. Selain itu, manusia sebagai individu harus terlibat dalam proses demokrasi dan membantu mereka yang memperjuangkan demokrasi di negara-negara otoriter. Perlu dipastikan bahwa negara dapat dipimpin oleh orang-orang yang tidak akan melakukan eskalasi konflik dan “perlombaan senjata” dalam sektor-sektor yang telah dibahas sebelumnya. Semua harus dilakukan guna memastikan agar tidak menyiapkan diri sendiri untuk menghadapi peperangan hari kemarin, tetapi untuk menghadapi peperangan pada masa depan.